



LAPORAN KINERJA Triwulan II

TAHUN 2024



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Triwulan II Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada BPBAP Ujung Batee dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan I Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi BPBAP Ujung Batee dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Aceh Besar, 18 Juli 2024
Kepala

Manijo, S.St.Pi





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya.....	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	7
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	12
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	13
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2. Analisis Capaian Kinerja	17
1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee	17
2. SS-2: Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan	19
3. SS-3: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.....	20
4. SS-4: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya	25
5. SS-5: Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan	27



6.	SS-6: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPAP Ujung Batee	28
3.3.	Efisiensi.....	41
3.4.	Kinerja Anggaran.....	42
BAB 4.	PENUTUP	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	12
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024.....	15
Tabel 4. Nilai PNBPN yang diperoleh.....	17
Tabel 5. Perbandingan capaian nilai PNBPN dengan UPT sejenis.....	18
Tabel 6. Persentase pakan mandiri yang produksi	19
Tabel 7. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri dengan UPT sejenis	19
Tabel 8. Persentase produksi calon induk unggul	20
Tabel 9. Persentase calon induk yang disalurkan	21
Tabel 10. Perbandingan capaian calon induk yang disalurkan dengan UPT sejenis	21
Tabel 11. Persentase bantuan benih yang disalurkan	22
Tabel 12. Perbandingan capaian bantuan benih dengan UPT sejenis.....	22
Tabel 13. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat.....	23
Tabel 14. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan.....	24
Tabel 15. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji.....	25
Tabel 16. Jumlah sampel pengujian berdasarkan ruang lingkup uji.....	25
Tabel 17. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji dengan UPT sejenis.....	26
Tabel 18. Persentase pengujian sampel antimikrobia resistan (AMR).....	26
Tabel 19. Perbandingan pengujian antimikrobia resistan dengan UPT sejenis.....	27
Tabel 20. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan.....	27
Tabel 21. Persentase capaian pakan dan obat ikan yang diuji dengan UPT sejenis.....	28
Tabel 22. Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee	29
Tabel 23. Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA	29
Tabel 24. Indeks profesionalitas ASN unit kerja	31
Tabel 25. Indeks pengelolaan kepegawaian	32



Tabel 26. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	33
Tabel 27. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	34
Tabel 28. Persentase Penyelesaian LHP BPK	35
Tabel 29. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	36
Tabel 30. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	37
Tabel 31. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN.....	38
Tabel 32. Nilai Kinerja Anggaran.....	38
Tabel 33. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa	39
Tabel 34. Nilai pengawasan kearsipan.....	40
Tabel 35. Persentase layanan perkantoran	41
Tabel 36. Pagu anggaran tahun 2020-2024	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPAP Ujung Batee	3
Gambar 2. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan jabatan	4
Gambar 3. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan	4
Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya	5
Gambar 5. <i>Screenshot</i> Nilai Kinerja Triwulan II Tahun 2024	14
Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2020-2024	42



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee Triwulan II Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan perjanjian kinerja pada bulan September telah ditetapkan 6 Sasaran Strategis (SS) dan 24 indikator kinerja, dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPBAP Ujung Batee sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sesuai aplikasi “kinerjaku” adalah sebesar 106,68%. Dari 24 indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan pengukuran capaian terdapat 11 indikator telah mencapai target yaitu:

1. IK.2 Persentase pakan mandiri yang diproduksi tercapai sebesar 42,64 % atau 852,83 % dari target Triwulan II.
2. IK.5 Persentase bantuan benih yang disalurkan tercapai sebesar 92,07 % atau 174,44 % dari target Triwulan II.
3. IK.6 Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan tercapai sebesar 63,64 % atau 116,67 % dari target Triwulan II.
4. IK.7 Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan tercapai sebesar 100 % atau 150 % dari target Triwulan II.
5. IK.8 Persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji tercapai sebesar 57,68 % atau 116,06 % dari target Triwulan II.
6. IK.9 Persentase pengujian Antimicrobial Resistance tercapai sebesar 51,43 % atau 112,50 % dari target Triwulan II.
7. IK.10 Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan tercapai sebesar 133,33 % atau 266,67 % dari target Triwulan II.
8. IK.16 Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 100 % atau 116,28 % dari target Triwulan II.
9. IK.18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 97,22 % atau 121,53 % dari target Triwulan II.
10. IK.19 Persentase indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 97,68 % atau 119,12 % dari target Triwulan II.
11. IK.24 Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 100 % atau 133,33 % dari target Triwulan II.

Terdapat 3 indikator kinerja yang belum mencapai target pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu:

1. IK.1 Persentase nilai PNBPN yang diperoleh hanya mencapai 81,79 % yaitu sebesar Rp 388.516.588 dari target Rp 475.000.000.



2. IK.3 Persentase calon induk unggul yang diproduksi hanya mencapai 0 % dari target Triwulan II yaitu 30 %.
3. IK.13 Persentase indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee hanya tercapai 76,68 % atau 95,85 % dari target Triwulan II.

Sementara itu indikator kinerja yang belum memiliki capaian karena tidak ada target di Triwulan II Tahun 2024 yaitu:

1. IK.4 Persentase bantuan calon induk yang disalurkan
2. IK.11 Nilai penilaian mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee
3. IK.12 Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA
4. IK.14 Indeks pengelolaan kepegawaian
5. IK.15 Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
6. IK.17 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee
7. IK.20 Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee
8. IK.21 Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee
9. IK.22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee
10. IK.23 Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan perikanan budidaya secara berkelanjutan, karena diyakini dengan potensi dan kekuatan yang ada, perikanan budidaya mampu memberi kontribusi pada 9 agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2020-2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam beberapa perspektif dengan masing-masing indikator kinerja seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Balai Budidaya Perikanan Air Payau Ujung Batee (BPBAP) Ujung Batee. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu



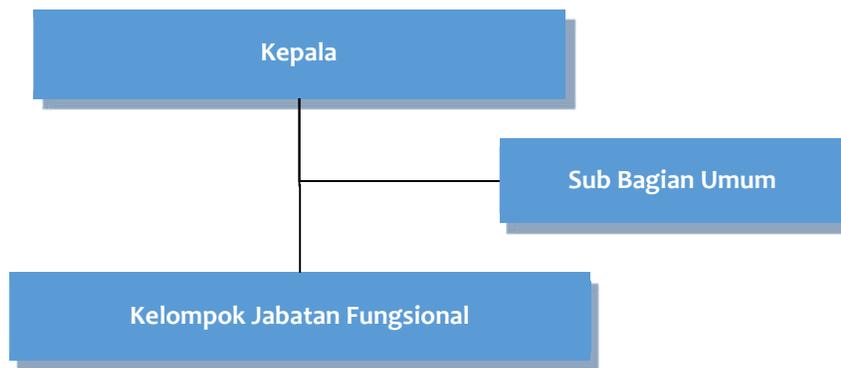
kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya kedepan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, disebutkan bahwa tugas Balai Budidaya Perikanan Air Payau (salah satunya BPBAP Ujung Batee) adalah **“melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau”**. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBAP Ujung Batee mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air payau;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas: a) Subbagian Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



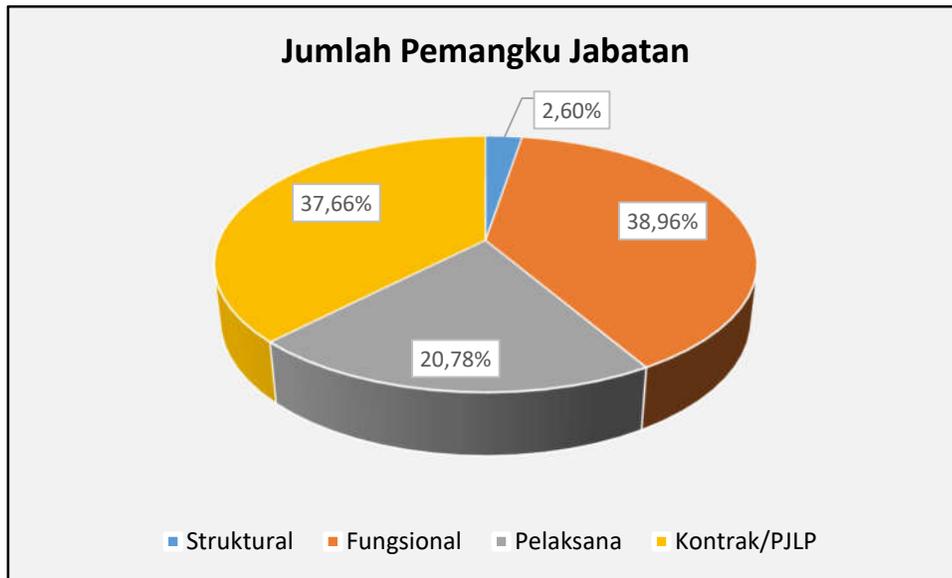
Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee

1.4. Sumber Daya Manusia

Total keseluruhan pegawai BPBAP Ujung Batee sebanyak 76 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 42 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak/PJLP sebanyak 29 orang. Pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu sebanyak 30 orang, sementara pelaksana hanya sebanyak 16 orang, dan pejabat struktural 2 orang.

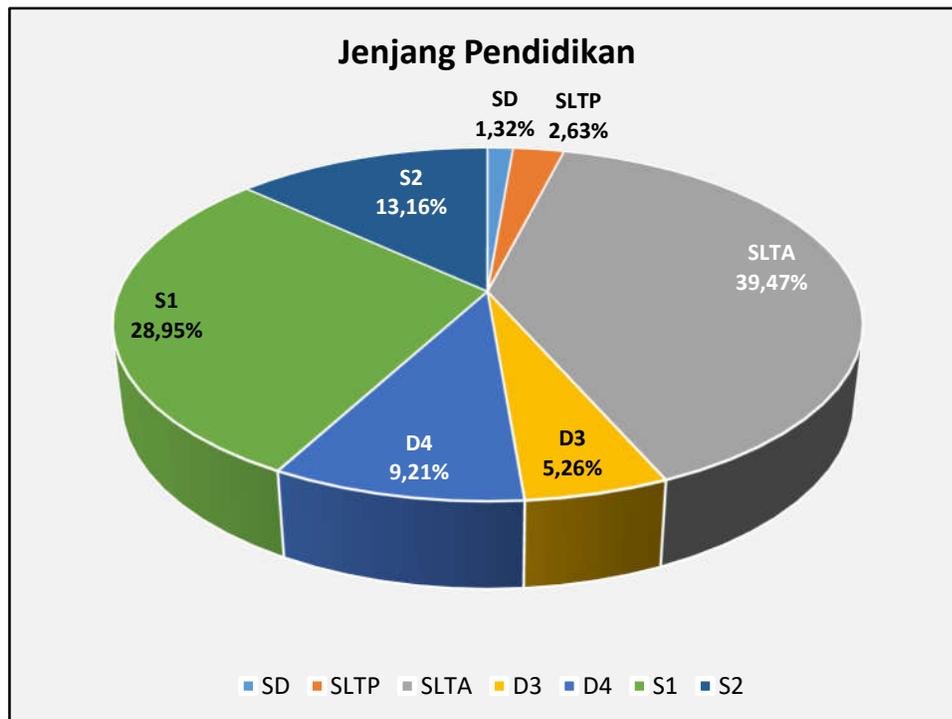
Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan	PNS (orang)	PPPK (orang)	
1	Struktural	1 Kepala Balai	1		
		2 Kepala Sub Bagian Umum	1		
2	Fungsional	1 Analis Akuakultur Ahli Muda	2		
		2 Analis Akuakultur Ahli Pertama	-	3	
		3 Pengawas Perikanan Ahli Madya	1		
		4 Pengawas Perikanan Ahli Muda	7		
		5 Pengawas Perikanan Ahli Pertama	2		
		6 Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	4		
		7 Pengawas Perikanan Pelaksana	2		
		8 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	2		
		9 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	1	
		10 Teknisi Akuakultur Pemula			2
		11 Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	1		
		12 Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	1		
		13 Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
3	Pelaksana	1 Pengelola Laboratorium	1		
		2 Teknisi Perikanan Budidaya	9		
		3 Teknisi Listrik dan Jaringan	1		
		4 Analis Tata Usaha	1		
		5 Penyusun Laporan Keuangan	1		
		6 Pengelola Keuangan	1		
		8 Pengelola Surat	1		
		9 Pengadministrasi Barang Milik Negara	1		
		PNS dan PPPK			42
Tenaga Kontrak dan PJLP				29	



Gambar 2. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan jabatan

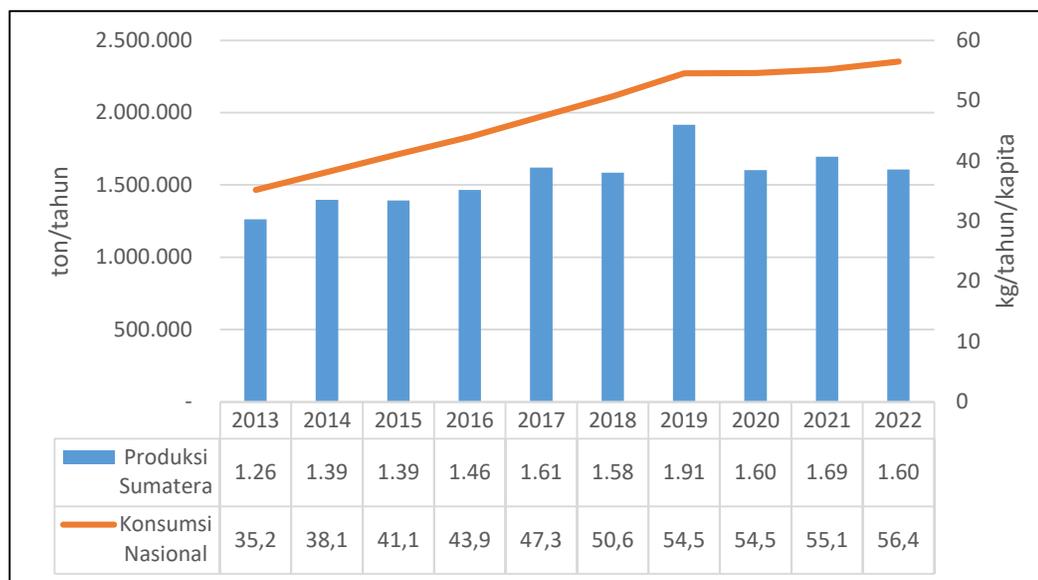
Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPBAP Ujung Batee adalah sebagai berikut: (i) S2 sebanyak 9 orang (21%); (ii) S1 sebanyak 17 orang (40%); (iii) D4 sebanyak 4 orang (9%); (iv) D3 sebanyak 3 orang (7%); dan (v) SLTA sebanyak 10 orang (23%).



Gambar 3. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya

Selama 10 tahun terakhir konsumsi ikan secara nasional mengalami peningkatan sebesar 60,41 %, tahun 2013 hanya 35,2 kg/tahun/kapita menjadi 56,4 kg/tahun/kapita di 2022. Sementara Volume produksi perikanan budidaya untuk wilayah Sumatera (sebagai wilayah kerja BPBAP Ujung Batee) tidak mengalami peningkatan sebanding dengan konsumsi ikan nasional, hanya meningkat sebesar 27,25 % dari tahun 2013 hanya 1,26 juta ton/tahun menjadi 1,6 juta ton/tahun di 2022 (sumber data diolah dari <https://statistik.kkp.go.id>). Adanya ketimpangan antara kebutuhan konsumsi ikan nasional dengan volume produksi menjadi potensi bagi BPBAP Ujung Batee untuk mendukung peningkatan volume produksi, melalui penyediaan induk dan benih yang berkualitas maupun bimbingan teknis perikanan budidaya.



Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budidaya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal.

- a. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (v) pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan) belum optimal diterapkan oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien.



- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya meliputi: (i) ruang untuk usaha perikanan budidaya belum ada kepastian memadai, (ii) regulasi dan perizinan lintas sektoral belum begitu simetrik sehingga menghambat perkembangan usaha perikanan budidaya, dan (iii) perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik lagi permasalahan yang dihadapi BPBAP Ujung Batee yaitu adanya ketimpangan antara sumber daya (baik SDM maupun dukungan anggaran) dengan luas wilayah kerja. Wilayah kerja BPBAP Ujung Batee mencakup seluruh Sumatera yang begitu luas. Anggaran hanya cukup mengakomodir kegiatan di Aceh dan Sumut, selain itu instalasi budidaya perikanan BPBAP Ujung Batee hanya satu dan berada di Aceh Besar, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, maupun Lampung.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPBAP Ujung Batee Triwulan II Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBAP Ujung Batee selama kurun waktu April 2024 sampai dengan Juni 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBAP Ujung Batee serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBAP Ujung Batee, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, penetapan kinerja BPBAP Ujung Batee serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi indikator kinerja BPBAP Ujung Batee serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Merujuk pada visi besar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Sedangkan tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah disebutkan di atas, BPBAP Ujung Batee menetapkan tujuan pokok dalam kegiatannya yaitu:

1. Melaksanakan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;



2. Melaksanakan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
3. Melaksanakan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
4. Melaksanakan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
5. Mengelola pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
6. Melaksanakan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
7. Melaksanakan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
8. Melaksanakan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
9. Melaksanakan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Untuk melakukan pengukuran atas pencapaian tujuan yang ditetapkan maka harus ditetapkan pula sasaran strategis yang menjadi indikator keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang berkembang. BPBAP Ujung Batee telah menetapkan Sasaran Strategis dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi BPBAP Ujung Batee 2020 - 2024.

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Nilai PNBPN satker BPBAP Ujung Batee
2. **Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 2) Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 3) Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 4) Produksi calon induk di lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 5) Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 6) Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat
3. **Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 7) Persentase produksi pakan mandiri dibandingkan dengan bahan baku yang tersedia lingkup BPBAP Ujung Batee



4. **Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang pakan dan obat ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 8) Persentase jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan oleh BPBAP Ujung Batee
5. **Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 9) Persentase sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 10) Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPBAP Ujung Batee
6. **Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 11) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 12) Persentase Penyelesaian LHP BPK atas Satker BPBAP Ujung Batee
 - 13) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 14) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 15) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker BPBAP Ujung Batee
 - 16) Nilai Kinerja Anggaran satker BPBAP Ujung Batee
 - 17) Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa satker BPBAP Ujung Batee
 - 18) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satker BPBAP Ujung Batee
 - 19) Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 20) Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 21) Persentase layanan perkantoran lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 22) Nilai pengawasan kearsipan lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 23) Hasil penilaian konsensus Zona Integritas lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 24) Persentase jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilker BPBAP Ujung Batee

Matriks keselarasan indikator kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024 dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2024 dapat dilihat lebih detail pada Lampiran 1.



No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024	Keterangan	
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkatkan lingkup BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp 000)	1.034.278	1.167.145	1.251.476	1.376.624	1.514.286	1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah 000)	1.232.517	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
2	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	2	Percantohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)	1	2	1	1	1						Mengikuti dokumen perencanaan anggaran (DIPA) tahun 2024	
3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana LPT	3	UPT perikanan budidaya yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
4	Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang disalurkan ke masyarakat (kelompok)	7	17	15	15	15	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
5		5	Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan (unit)		1	1	1	1						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
6		6	Berth yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	7.110.000	7.683.315	8.000.000	9.000.000	10.000.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Persentase Bantuan Berth yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
7		7	Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat (ekor)		14.820	15.000	15.000	15.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
8		8	Calon induk unggul yang diproduksi (ekor)	49.400	64.100	65.000	67.000	70.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
9		9	Pakan ikan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	100.000	70.000	72.000	75.000	77.000	2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
10		10	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)		37.000	37.000	37.000	37.000						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
11		11	Rehabilitasi sarana dan prasarana UPR/HSRT (unit)		3	3	3	3						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
12		12	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (paket)	1	4	4	4	4						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
13		13	Layanan Diseminasi Teknologi PB (layanan)		5	5	5	5	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	7	Persentase Diseminasi Teknologi Perbesar Ikan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
14	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	14	Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650	4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
15		15	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)						5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	10	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB	
														100	Terobosan kebijakan di DJPB



No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024	Keterangan
6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPBAP Ujung Batee	15	Indeks profesionalisme ASN lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	72	73	74	75	76	6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		16	Penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee (%)	100	100	100	100	100			17	Persentase Pemeliharaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Saktier BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		17	Nilai rekon pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee (%)	85	90	92	94	96			11	Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		18	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	65	70	75	85			18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	85	87	90						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (%)	88	89	90	91	92			19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	85	86	87	88	89			21	Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa (%)		72,5	75	75	75			22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		23	Tingkat pengelolaan barang milik negara (%)		72,5	75	75	75			20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											12	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											14	Indeks Pengelolaan Kepegawalan (Indeks)	4	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											16	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											23	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											24	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja BPBAP Ujung Batee tahun 2024 dituangkan dalam perjanjian kinerja (sebagai mana terlampir).

Pada Penetapan Kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan target dengan target yang tercantum pada Rencana Strategi BPBAP Ujung Batee 2020-2024 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian menindaklanjuti kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat Di BPBAP Ujung Batee	1.	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah)	1.232.517.000
2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan	2.	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		6.	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8.	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9.	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan Dan Obat Ikan	10.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
6.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		12.	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85
		14.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		15.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		16.	Persentase Pemberitaan Netral Dan Positif Terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	17. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
	19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,76
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	80,0
	21. Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	86
	22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80,0
	23. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
	24. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	80

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

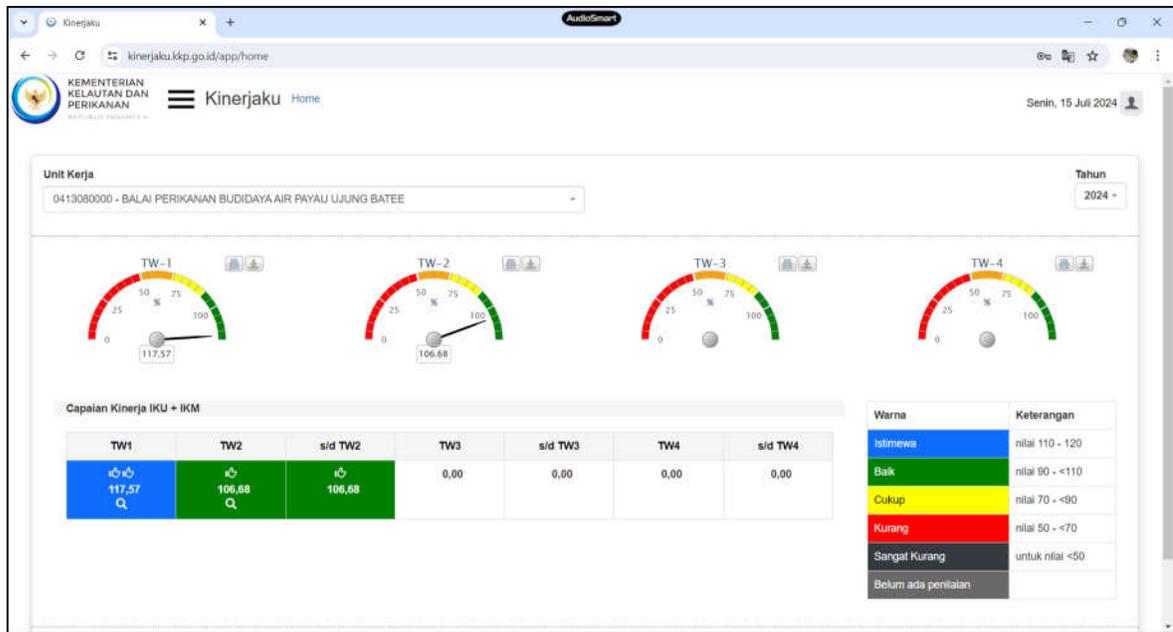
Pengukuran capaian kinerja BPBAP Ujung Batee menggunakan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*. 1) *Maximize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik; 2) *Minimize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik; dan 3) *Stabilize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Pengukuran capaian Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>;
5. Status capaian Indikator Kinerja yang ada dalam aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> ditunjukkan dengan warna: (i) hitam, kategori sangat kurang (untuk nilai <50); (ii) merah, kategori kurang (nilai 50 - <70); (iii) kuning, kategori cukup (nilai 70 - <90); (iv) hijau, kategori baik (nilai 90 - <110); dan (v) biru, kategori istimewa (nilai 110 – 120).

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian



dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implemmentasi aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.



Gambar 5. Screenshot Nilai Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>, terlihat bahwa Nilai Capaian Kinerja BPBAP Ujung Batee sebesar 106,68 % yang berada dalam kategori BAIK. Artinya secara umum indikator kinerja sudah melampaui target.



BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada Tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPBAP Ujung Batee menitikberatkan pada 6 Sasaran Strategis dengan 24 indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id" diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 106,68 %. Adapun rekapitulasi capaian kinerja BPBAP Ujung Batee pada Triwulan II Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2024

	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target s.d Tw II	Realisasi s.d Tw II	Realisasi Terhadap Target s/d Tw II (%)	Realisasi Terhadap Target 2024 (%)
1	Nilai PNBP yang diperoleh	1.232.517	Ribuan Rupiah	475.000	388.517	81,79	31,52
2	Persentase pakan mandiri yang diproduksi	80	Persen	5	42,64	852,83	53,30
3	Persentase calon induk unggul yang diproduksi	100	Persen	30	0	0	0
4	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan	75	Persen	-	-	-	-
5	Persentase bantuan benih yang disalurkan	75	Persen	52,78	92,07	174,44	122,76
6	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan	100	Persen	54,55	63,64	116,67	63,64
7	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan	100	Persen	66,67	100	150	100
8	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji	100	Persen	49,70	57,68	116,06	57,68
9	Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR)	100	Persen	45,71	51,43	112,50	51,43
10	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan	100	Persen	50	133,33	266,67	133,33
11	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee	82	Nilai	-	-	-	-
12	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee	91	Persen	-	-	-	-
13	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee	85	Indeks	80	76,68	95,85	90,21
14	Indeks pengelolaan kepegawaian	4	Indeks	-	-	-	-
15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	76	Nilai	-	-	-	-
16	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee	86	Persen	86	100	116,28	116,28



	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target s.d Tw II	Realisasi s.d Tw II	Realisasi Terhadap Target s/d Tw II (%)	Realisasi Terhadap Target 2024 (%)
17	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee	100	Persen	-	-	-	-
18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee	80	Persen	80	97,22	121,53	121,53
19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee	93,76	Nilai	82	97,68	119,12	104,18
20	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	-	-	-	-
21	Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee	86	Nilai	-	-	-	-
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	-	-	-	-
23	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee	75	Nilai	-	-	-	-
24	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee	80	Persen	75	100	133,33	125

Berdasarkan tabel capaian target indikator kinerja Triwulan II Tahun 2024 terdapat 11 indikator yang mencapai dan melebihi target indikator kinerja yaitu:

- 1) IK.2 Persentase pakan mandiri yang diproduksi tercapai sebesar 852,83 %
- 2) IK.5 Persentase bantuan benih yang disalurkan tercapai sebesar 174,44 %
- 3) IK.6 Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan tercapai sebesar 116,67 %
- 4) IK.7 Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan tercapai sebesar 150 %
- 5) IK.8 Persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji tercapai sebesar 116,06 %
- 6) IK.9 Persentase pengujian Antimicrobial Resistance tercapai sebesar 112,50 %
- 7) IK.10 Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan tercapai sebesar 266,67 %
- 8) IK.16 Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 116,28 %
- 9) IK.18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 121,53 %
- 10) IK.19 Persentase indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 119,12 %
- 11) IK.24 Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee tercapai sebesar 133,33 %.

Terdapat 3 indikator kinerja yang tidak mencapai target di Triwulan II Tahun 2024 yaitu nilai PNBP yang diperoleh (IK.1), persentase indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee (IK.13), serta persentase calon induk unggul yang diproduksi (IK.3). Sementara itu sebanyak 10 indikator kinerja tidak terdapat capaian karena tidak ada target di Triwulan



II Tahun 2024 dan akan dihitung pada triwulan berikutnya. Secara umum indikator kinerja BPBAP Ujung Batee Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai. Begitu pun pada capaian kinerja secara keseluruhan terlihat capaian target mencapai 106,68 % (dapat dilihat pada Gambar 5).

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut:

1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee

IK-1: Nilai PNBP yang diperoleh

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dasar hukum pemungutan PNBP pada BPBAP Ujung yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang pedoman umum PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber PNBP BPBAP Ujung Batee berasal dari:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yaitu PNBP yang berasal dari pungutan perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budidaya Perikanan.
- 2) PNBP Non SDA yaitu PNBP yang berasal dari penjualan hasil usaha budidaya dan imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. PNBP ini terdiri dari: (i) Penjualan hasil Perikanan Budidaya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Tabel 4. Nilai PNBP yang diperoleh

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
475.000.000	388.516.588	81,79	565.894.380	68,66	1.232.517.000	31,52

Target nilai PNBP BPBAP Ujung Batee tahun 2024 adalah Rp. 1.232.517.000. Realisasi nilai PNBP pada Triwulan II tahun 2024 mencapai Rp. 388.516.588 yaitu 81,79 % dari target Triwulan II tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan target tahunan maka realisasi nilai PNBP BPBAP Ujung Batee Triwulan II tahun 2024 telah tercapai 31,52 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 565.894.380 maka

realisasi nilai PNBPN Triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai perbandingan realisasi sebesar 68,66 %. Analisis rendahnya capaian nilai PNBPN pada Triwulan II tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2023 karena pada beberapa divisi kegiatan produksi mengalami kegagalan produksi akibat serangan penyakit serta terkendala masalah pemasaran komoditas yang tidak terserap pasar secara maksimal dan kontinyu. Selain itu, pada kegiatan produksi udang ditambak sebagai kegiatan dengan target PNBPN tertinggi mengalami gagal panen, sehingga sangat mempengaruhi capaian target nilai PNBPN pada Triwulan II tahun 2024. Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja perolehan nilai PNBPN namun dukungan anggaran melekat pada kegiatan-kegiatan teknis BPBAP Ujung Batee.

Jika dibandingkan dengan UPT Budidaya Air Payau eselon 3 lainnya, capaian nilai PNBPN BPBAP Ujung Batee termasuk rendah dalam hal jumlah rupiah dibandingkan UPT Payau DJPB. Persentase nilai capaian PNBPN BPBAP Ujung Batee (31,52 %) lebih rendah jika dibandingkan dengan BPBAP Situbondo (123,38 %) dan BPBAP Takalar (84,16 %) namun lebih tinggi dibanding persentase nilai capaian PNBPN BBPBAP Jepara (26,12 %) pada Triwulan II tahun 2024.

Tabel 5. Perbandingan capaian nilai PNBPN dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target 2024	Capaian TW II (Rp.)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
1.	BBPBAP Jepara	4.500.400.000	1.175.547.249	26,12
2.	BPBAP Situbondo	3.552.374.000	4.382.963.067	123,38
3.	BPBAP Ujung Batee	1.232.517.000	388.516.588	31,52
4.	BPBAP Takalar	1.638.158.000	1.416.526.433	84,16

Rekomendasi tindak lanjut terhadap permasalahan pada kegiatan Triwulan I tahun 2024 adalah (1) melakukan peninjauan kembali atas rencana penerimaan dan melibatkan beberapa pihak internal dalam penyusunan rencana (pimpinan, keuangan, bendahara penerimaan, dan para pelaksana kegiatan teknis di lapangan); (2) melakukan persiapan produksi, evaluasi dan monitoring pada masing masing divisi produksi. Hasil tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan pada periode Triwulan II tahun 2024 yaitu (1) melakukan koordinasi dan perencanaan serta evaluasi produksi pada kegiatan yang mempunyai target PNBPN tertinggi seperti pada kegiatan produksi udang di tambak; (2) pelaksana kegiatan melakukan produksi secara maksimal dengan perencanaan yang terukur melalui monitoring dan evaluasi proses produksi sehingga tercapai pemenuhan target nilai PNBPN sesuai rencana realisasi.

Rencana tindak lanjut pencapaian nilai PNBPN BPBAP Ujung Batee periode berikutnya pada Triwulan III adalah melanjutkan pemenuhan target nilai PNBPN sesuai rencana realisasi yang dijadwalkan dengan (1) melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki capaian target PNBPN tertinggi sehingga target nilai PNBPN pada Triwulan III tahun 2024 dapat tercapai; (2) melakukan produksi secara maksimal dan terukur serta melakukan promosi produk yang dihasilkan agar dapat terserap pasar.



2. SS-2: Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan

IK-2: Persentase pakan mandiri yang diproduksi

Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders bidang perikanan budidaya, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perikanan budidaya sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Terkait dengan bidang perikanan budidaya, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan meliputi bidang pakan dan obat ikan, perbenihan, produksi dan usaha budidaya dan kawasan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

Produksi pakan mandiri BPBAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan pakan buatan untuk bantuan ke masyarakat pembudidaya lingkup BPBAP Ujung Batee. Pakan buatan yang dihasilkan adalah pakan terapung untuk ikan air payau dan pakan tenggelam untuk ikan air payau.

Tabel 6. Persentase pakan mandiri yang produksi

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
5	42,64	852,83	30,45	140,03	80,00	53,30

Target persentase pakan mandiri yang diproduksi BPBAP Ujung Batee pada tahun 2024 adalah 80 %. Realisasi capaian pakan mandiri yang diproduksi pada Triwulan II tahun 2024 mencapai 42,64 %. Jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2024 maka tercapai 853,83 % atau mencapai 53,30 % jika dibandingkan dengan target tahunan. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 30,45 % maka realisasi persentase produksi pakan mandiri BPBAP Ujung Batee pada Triwulan II tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 140,03 %. Hal ini karena tidak terdapat kendala dalam pemenuhan target capaian produksi pakan mandiri pada periode Triwulan II tahun 2024.

Tabel 7. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target TW II (%)	Capaian TW II (%)
1.	BBPBAP Jepara	38	83,65
2.	BPBAP Situbondo	35	35,2
3.	BPBAP Ujung Batee	5	42,64
4.	BPBAP Takalar	30	30,14

Berdasarkan perbandingan capaian produksi pakan mandiri lingkup UPT Payau DJPB pada Triwulan II tahun 2024, BPBAP Ujung Batee (42,64 %) memiliki capaian produksi pakan



mandiri lebih tinggi dibanding BPBAP Situbondo (35,2 %) dan BPBAP Takalar (30,14 %) namun lebih rendah dibanding capaian produksi pakan mandiri BBPBAP Jepara (83,65 %).

Rekomendasi tindak lanjut dari rencana Triwulan I tahun 2024 yang dilakukan pada kegiatan Triwulan II tahun 2024 adalah (1) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi pakan mandiri dan berkoordinasi dengan pihak penyedia untuk memastikan ketersediaan bahan baku pakan dalam proses produksi; (2) melakukan promosi penjualan pakan mandiri kepada pembudidaya. Rencana tindak lanjut pencapaian target produksi pakan mandiri oleh BPBAP Ujung Batee periode berikutnya adalah (1) melakukan monitoring dan evaluasi agar produksi pakan mandiri memenuhi target yang telah ditetapkan; (2) sosialisasi produk pakan mandiri ke masyarakat pembudidaya pada pertemuan lapangan; (3) melakukan perencanaan dan koordinasi dengan bagian keuangan terkait pengadaan bahan baku pakan.

3. SS-3: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

IK-3: Persentase calon induk unggul yang diproduksi

Produksi induk unggul di BPBAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan induk bagi unit perbenihan pada masyarakat stakeholder perikanan budidaya. Tersedianya induk unggul akan mendukung peningkatan produksi benih yang merupakan komponen utama kegiatan pengembangan kualitas dan kuantitas produksi perikanan budidaya.

Tabel 8. Persentase produksi calon induk unggul

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
30	-	-	102,67	-	100,00	-

Target capaian produksi calon induk unggul pada Triwulan II tahun 2024 adalah 30 % namun belum terdapat besaran persentase capaian produksi calon induk unggul pada periode ini. Analisa tidak tercapainya target produksi calon induk unggul pada periode Triwulan II tahun 2024 adalah karena pemeliharaan calon induk dilakukan sampai mencapai standar ukuran sesuai persyaratan petunjuk teknis. Penyebab belum mencapai ukuran sesuai standar disebabkan karena ketersediaan induk membutuhkan durasi pemeliharaan yang lama sampai pada usia produktif serta adanya keterbatasan calon induk udang vannamei dari penyuplai. Capaian Indikator persentase produksi calon induk unggul tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian indikator yang sama pada Triwulan II tahun 2023. Rekomendasi tindak lanjut kegiatan pada Triwulan I tahun 2024 yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan produksi serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga dapat meningkatkan produksi calon induk unggul. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah (1) melanjutkan pemeliharaan calon induk unggul sampai mencapai standar ukuran yang ditetapkan sesuai



petunjuk teknis; (2) melakukan perawatan dan mengontrol kondisi calon induk secara rutin supaya kondisi selalu sehat dan pematangan gonad dapat dipercepat.

IK-4: Persentase bantuan calon induk yang disalurkan

Persentase bantuan calon induk yang disalurkan merupakan kegiatan bantuan calon induk ikan yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Adapun komoditas-komoditas calon induk yang disalurkan ke masyarakat mengaju pada petunjuk teknis penyaluran bantuan calon induk tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP. Capaian diukur berdasarkan persentase jumlah penyaluran bantuan calon induk ikan dibandingkan dengan jumlah target bantuan calon induk ikan sesuai anggaran yang disediakan.

Tabel 9. Persentase calon induk yang disalurkan

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	75,00	-

Belum terdapat realisasi capaian persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada Triwulan II tahun 2024 karena kegiatan pada triwulan ini masih dalam proses untuk memproduksi calon induk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk bantuan. Capaian indikator kinerja persentase bantuan calon induk unggul yang disalurkan pada Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian yang sama pada Triwulan II tahun 2023 karena tidak terdapat target capaian pada kedua periode tersebut. Tujuan bantuan calon induk ke masyarakat adalah untuk meremajakan induk yang ada di unit pembenihan masyarakat sehingga dapat menghasilkan benih yang bermutu dan mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Kendala dalam penyaluran bantuan calon induk adalah tergantung dari ketersediaan hasil produksi calon induk serta serangan penyakit dalam proses produksi penyediaan calon induk.

Tabel 10. Perbandingan capaian calon induk yang disalurkan dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target Triwulan II (%)	Capaian (%)
1.	BBPBAP Jepara	-	-
2.	BPBAP Situbondo	-	-
3.	BPBAP Ujung Batee	-	-
4.	BPBAP Takalar	30	105,66

Tidak semua UPT Payau DJPB memiliki kegiatan penyaluran bantuan calon induk, antara lain BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo (Tabel 10). Kegiatan penyaluran bantuan calon induk oleh BPBAP Ujung Batee belum memiliki capaian realisasi pada Triwulan II tahun 2024, hanya BPBAP Takalar yang memiliki capaian penyaluran bantuan calon induk sebesar 105,66 % melampaui target sebesar 30 %. Rekomendasi rencana tindak lanjut Triwulan I tahun 2024 yang dilakukan pada kegiatan Triwulan II tahun 2024 adalah (1) melakukan koordinasi



dengan BPIU2K terkait ketepatan waktu penyediaan benih untuk calon induk yang akan dikirimkan ke BPBAP Ujung Batee; (2) melanjutkan pelaksanaan produksi calon induk dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga hasil produksi dapat disalurkan sebagai bantuan ke masyarakat; (3) melakukan monitoring penyakit berkala selama masa pemeliharaan calon induk.

Rencana tindak lanjut BPBAP Ujung Batee untuk kegiatan penyaluran bantuan calon induk pada periode berikutnya adalah memelihara calon induk unggul sampai mencapai standar ukuran yang dipersyaratkan untuk penyaluran bantuan serta monitoring penyakit selama kegiatan pemeliharaan calon induk.

IK-5: Persentase bantuan benih yang yang disalurkan

Guna pencapaian target kebutuhan bahan baku industri pengolahan dari sektor hulu terutama dari komoditas budidaya unggulan, maka sub sektor perbenihan memegang peranan sangat penting untuk menyediakan benih bermutu yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi, efisiensi dan efektivitas kegiatan budidaya.

Tabel 11. Persentase bantuan benih yang disalurkan

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
52,78	92,07	174,44	34,20	269,21	75,00	122,76

Pada periode Triwulan II tahun 2024 realisasi untuk IK bantuan benih yang disalurkan adalah 92,07 % dibandingkan target pada Triwulan II (52,78 %). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (75 %) maka realisasi capaian bantuan benih yang disalurkan pada Triwulan II sebesar 122,76 %. Realisasi persentase bantuan benih yang disalurkan mengalami pertumbuhan 269,21 % dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Tidak ditemukan kendala dalam proses produksi dan penyaluran bantuan benih Triwulan II tahun 2024 sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kendala yang mungkin menjadi hambatan dalam proses produksi benih adalah kondisi lingkungan pemeliharaan dan infeksi penyakit pada komoditas sehingga diperlukan monitoring berkala selama masa pemeliharaan benih.

Tabel 12. Perbandingan capaian bantuan benih dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target Triwulan II (%)	Capaian (%)
1.	BBPBAP Jepara	-	-
2.	BPBAP Situbondo	-	-
3.	BPBAP Ujung Batee	52,78	92,07
4.	BPBAP Takalar	30	60,12

Capaian kegiatan penyaluran bantuan benih oleh BPBAP Ujung Batee pada Triwulan II tahun 2024 (92,07 %) lebih tinggi dari BPBAP Takalar (60,12 %) dan telah melampaui target Triwulan II tahun 2024 (52,78 %). Adapun BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak terdapat kegiatan penyaluran benih ke masyarakat.



Rekomendasi tindak lanjut dari Triwulan I tahun 2024 yang dilakukan pada kegiatan Triwulan II tahun 2024 adalah melanjutkan proses produksi benih serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga mampu meningkatkan produksi benih dan menghasilkan benih yang sesuai dengan standar persyaratan penyaluran ke masyarakat. Rencana aksi kegiatan penyaluran bantuan benih oleh BPBAP Ujung Batee untuk periode berikutnya adalah mempertahankan kinerja produksi benih untuk memenuhi target bantuan benih yang akan disalurkan pada tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai.

IK-6: Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan

Budidaya ikan sistem bioflok merupakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk pengolahan limbah organik sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak negatif dari limbah hasil budidaya terhadap lingkungan. Manfaat dari sistem bioflok adalah efisiensi penggunaan pakan dan air serta meningkatkan kualitas air pada kolam budidaya. Budidaya ikan sistem bioflok akan memberikan keuntungan kepada masyarakat pembudidaya serta menjamin keberlanjutan usaha perikanan yang ramah lingkungan. BPBAP Ujung Batee sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Perikanan dan Kelautan yang ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran bantuan pemerintah sarana prasarana budidaya ikan lele atau ikan nila dengan sistem bioflok. BPBAP Ujung Batee melakukan kegiatan pencontohan pengelolaan produksi dan usaha melalui sarana prasarana bioflok yang diserahkan kepada masyarakat sehingga produksi perikanan budidaya dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Realisasi capaian kegiatan ini berupa bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan sistem bioflok.

Tabel 13. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023*	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
54,55	63,64	116,67	-	-	100,00	63,64

* Triwulan 2 tahun 2023 ada target tetapi tidak ada capaian.

Realisasi capaian sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 63,64 %. Capaian indikator kinerja sarana prasarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat tahun 2024 (63,64 %) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 belum ada capaian walaupun telah ditargetkan sebesar 21,05 %. Sampai dengan Triwulan II tahun 2024, bantuan sarana prasarana bioflok telah terealisasi sebanyak 21 paket kelompok penerima yang tersebar di provinsi Jawa Barat (4 kelompok), Aceh (14 kelompok), dan Sumatera Utara (3 kelompok).

Keterlambatan pengiriman proposal oleh pihak penerima sarana bioflok menjadi kendala pada periode sebelumnya. Rekomendasi tindak lanjut terhadap kegiatan Triwulan I tahun 2024 adalah meminta secara intensif kepada pihak pokdakan untuk segera menyelesaikan administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis. Hasil tindak

lanjut rekomendasi adalah memberikan batas waktu kepada penerima bantuan sarana prasarana biolok untuk menyelesaikan administrasi sesuai petunjuk teknis; melakukan identifikasi dan verifikasi kesesuaian data yang diperoleh dari calon penerima bantuan serta melakukan pemeriksaan dan pengukuran terkait kesesuaian bantuan sarana prasarana budidaya yang diberikan. Rencana aksi pada triwulan berikutnya adalah melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok yang telah mengirimkan proposal bantuan; menjelaskan secara mendetil aturan yang berlaku sesuai dengan petunjuk teknis kepada pihak calon penerima; serta melakukan distribusi bantuan dan serah terima bantuan kepada kelompok pembudidaya.

IK-7: Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Diseminasi teknologi pembesaran ikan merupakan suatu kegiatan interaktif dalam menyampaikan informasi teknologi budidaya perikanan pada lokasi yang telah ditentukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku pembudidaya perikanan untuk dapat meningkatkan produksi. Capaian dari kegiatan ini dihitung berdasarkan jumlah peserta diseminasi teknologi yang menerima manfaat dibandingkan dengan jumlah target peserta kegiatan diseminasi teknologi sesuai perencanaan.

Tabel 14. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023*	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
66,67	100	150	-	-	100,00	100

* Triwulan 2 tahun 2023 tidak ada target.

Realisasi persentase capaian diseminasi teknologi pembesaran ikan terhadap target pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 150 %, jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian sebesar 100 %. Target capaian pada Triwulan II tahun 2024 adalah 100 peserta atau 66,67 %. Kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan pada Triwulan II tahun 2024 dilaksanakan di Sumatera Utara pada bulan Juni 2024. Tidak terdapat capaian indikator untuk persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan pada periode yang sama tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2024.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan berupa bimbingan teknis pembesaran ikan dengan sistem bioflok bahwa bantuan sarana prasarana dan percontohan usaha budidaya sistem bioflok dapat menjadi contoh dan dapat diikuti oleh masyarakat sekitar untuk peningkatan kesejahteraan pembudidaya. Namun karena latar belakang yang berbeda-beda sehingga pihak penerima kesulitan dalam memahami teknologi bioflok, selain itu terdapat peserta pokdakan penerima bantuan yang tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah melaksanakan diseminasi pada lokasi yang telah ditentukan dan melakukan bimbingan teknis yang lebih intens secara tatap muka di lapangan.



Tidak terdapat rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya pada Triwulan III tahun 2024 karena capaian indikator kinerja persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 100 % dengan rincian yaitu 2 kegiatan pada bulan Februari 2024 (Aceh) dengan 200 peserta bimbingan teknis dan 1 kegiatan pada bulan Juni 2024 (Sumatera Utara) dengan 100 peserta bimbingan teknis.

4. SS-4: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya

IK-8: Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Sasaran strategis yang ke empat dari BPBAP Ujung Batee ini merupakan wujud kepedulian balai terhadap pembudidaya ikan wilayah kerja dalam menjaga dan memelihara lingkungan budidaya ikan. Dalam sasaran ini BPBAP Ujung Batee telah menyediakan pelayanan dan fasilitas dalam bentuk laboratorium pengujian. Dalam mengelola laboratorium, analis melakukan uji sampel penyakit, parameter air dan analisa proksimat. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dibandingkan dengan target sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari monitoring internal BPBAP Ujung Batee maupun dari stakeholder eksternal.

Tabel 15. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
49,50	57,68	116,06	42,77	134,86	100,00	57,68

Realisasi persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji berhasil mencapai target Triwulan II yaitu sebesar 116,06 % dan mencapai sebesar 57,68 % dari target tahunan. Realisasi persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji mengalami peningkatan pengujian sebesar 134,86 % apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2023. Adapun capaian jumlah sampel yang telah diuji pada Triwulan II tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Jumlah sampel pengujian berdasarkan ruang lingkup uji

Ruang Lingkup Uji	Jumlah Sampel
Kualitas air (kimia)	190
Mikrobiologi	25
Biologi molekuler	88
Jumlah	303

Pencapaian realisasi target pada Triwulan II tahun 2024 didominasi oleh pelayanan pengujian sampel kualitas air, sampel yang dihitung hanya pengujian secara kimiawi tidak termasuk pengujian fisika. Kendala dalam pengujian adalah belum ada pembaruan alat



sehingga terkadang untuk kegiatan monitoring ke lapangan maka tidak dapat melakukan pelayanan pengujian *in situ* pada lokasi pengambilan sampel.

Tabel 17. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target TW II (%)	Capaian TW II (%)
1.	BBPBAP Jepara	50	78,14
2.	BPBAP Situbondo	50	164,32
3.	BPBAP Ujung Batee	49,50	57,68
4.	BPBAP Takalar	50	127,25

Berdasarkan perbandingan capaian pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan antar UPT Payau DJPB, BPBAP Ujung Batee (57,68 %) memiliki capaian lebih rendah dibandingkan UPT Payau lainnya. Namun capaian BPBAP Ujung Batee telah melampaui target yang ditetapkan (49,50 %) pada Triwulan II tahun 2024.

Rekomendasi terhadap tindak lanjut pada Triwulan I tahun 2024 adalah melakukan perbaikan pada beberapa alat sehingga proses pengujian sampel dapat berlangsung dengan baik dan berkoordinasi dengan pusat untuk penyediaan anggaran pengadaan alat uji di laboratorium. Hasil rekomendasi tindak lanjut telah dilakukan perbaikan pada beberapa alat sehingga proses pengujian sampel dapat berlangsung dengan baik. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah mengidentifikasi dan membuat perencanaan usulan pembaruan alat untuk kegiatan monitoring ke lapangan agar dapat melakukan pelayanan pengujian *in situ* sehingga kinerja laboratorium dapat meningkat untuk pelayanan pengujian sampel.

IK-9: Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR)

Pengendalian dan pengujian AMR (*Anti Microbial Resistance*) merupakan upaya pengendalian lingkungan melalui pengujian AMR yang telah dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Indikator ini bertujuan untuk mengendalikan bahaya cemaran residu yang dapat resisten baik pada lingkungan maupun organisme akuatik agar tidak terjadi resistensi yang berasal dari residu kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan di wilayah kerja. Resistensi dapat timbul secara spontan melalui proses mutasi, selain itu gen dapat diwariskan secara vertikal atau dapat diperoleh dari bakteri lain secara horizontal melalui unsur genetik seluler seperti plasmid. Cara menghitung capaian kegiatan pengujian sampel ini adalah dengan menghitung jumlah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian AMR sesuai dengan laporan hasil uji.

Tabel 18. Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR)

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
45,71	51,43	112,5	60,78	84,61	100,00	51,43



Realisasi persentase pengujian sampel antimikrobal jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 112,5 % dan 51,43 % jika dibandingkan dengan target tahunan. Capaian Triwulan II tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Tidak terdapat kendala dalam pengambilan dan pengujian sampel antimikrobal pada Triwulan II tahun 2024.

Tabel 19. Perbandingan pengujian antimikrobal resisten dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target TW II (%)	Capaian TW II (%)
1.	BBPBAP Jepara	40	172,86
2.	BPBAP Situbondo	50	125
3.	BPBAP Ujung Batee	45,71	51,43
4.	BPBAP Takalar	30	94,29

Berdasarkan perbandingan capaian pengujian sampel antimikrobal resisten antar UPT Payau DJPB, BPBAP Ujung Batee (51,43 %) memiliki capaian lebih rendah dibandingkan UPT Payau lainnya. Namun capaian BPBAP Ujung Batee telah memenuhi target yang ditetapkan (45,71 %) pada Triwulan II tahun 2024.

Rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan pada Triwulan I tahun 2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan kegiatan berjalan sesuai target pada Triwulan II 2024. Hasil tindak lanjut rekomendasi, pada Triwulan II tahun 2024 ini telah dilakukan sampling dan pengujian antimikrobal pada sampel dari Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireun. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah melakukan pengambilan dan pengujian sampel antimikrobal resisten sesuai perencanaan.

5. SS-5: Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan

IK-10: Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

Pengujian nutrisi dan mutu pakan ikan merupakan kegiatan pengujian laboratorium nutrisi pakan meliputi salah satu atau keseluruhan (lengkap) dari parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah sampel pakan ikan yang telah diuji dibandingkan dengan target sampel pakan sesuai perencanaan.

Tabel 20. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
50	133,33	266,67	45,10	295,63	100,00	133,33

Realisasi persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar 266,67 % dan jika dibandingkan dengan target tahunan mencapai sebesar 133,33 %. Realisasi persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan Triwulan II tahun 2024 mengalami

pertumbuhan 295,63 % dibanding periode yang sama pada Triwulan II tahun 2023. Namun masih terdapat kendala pada Triwulan II ini karena belum ada pembaruan terhadap kerusakan alat uji nutrisi dan mutu pakan sehingga tidak semua parameter uji dapat dilakukan. Selain itu juga tidak tersedia anggaran khusus perjalanan pengambilan sampel untuk pengujian nutrisi dan mutu pakan sehingga pencapaian indikator hanya sampling pasif yaitu menerima sampel yang masuk ke laboratorium untuk pemeriksaan uji nutrisi dan mutu pakan.

Tabel 21. Persentase capaian pakan dan obat ikan yang diuji dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target TW II (%)	Capaian TW II (%)
1.	BBPBAP Jepara	45	67,14
2.	BPBAP Situbondo	50	115,52
3.	BPBAP Ujung Batee	50	133,33
4.	BPBAP Takalar	30	125

Jika dibandingkan dengan UPT Payau DJPB lainnya, capaian persentase pengujian sampel nutrisi dan mutu pakan Triwulan II tahun 2024 oleh BPBAP Ujung Batee lebih tinggi (133,33 %) dibandingkan BBPBAP Jepara (67,14 %), BPBAP Situbondo (115,52 %), dan BPBAP Takalar (125 %). Rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah Membuat perencanaan kebutuhan sumber dana untuk perawatan dan penggantian periper al peralatan uji nutrisi, selain itu juga melakukan koordinasi dengan pusat terkait kebutuhan sumber dana. Hasil tindak lanjut rekomendasi telah disusun perencanaan kebutuhan sumber dana untuk perawatan dan penggantian periper al peralatan uji nutrisi. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan BPBAP Ujung Batee untuk periode berikutnya adalah melakukan pengujian sampel nutrisi berdasarkan sampel yang diperoleh atau ditargetkan.

6. SS-6: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee

IK-11: Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi padapencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai rekon kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee merupakan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan tiga aspek, antara lain: Kepatuhan (Bobot 30%), Kesesuaian (30%), Ketercapaian (40%). Adapun selain pemenuhan dokumen SAKIP juga dilakukan sinkronisasi



data antara Aplikasi Kinerjaku, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Manual IKU, Rencana Aksi, Lembar Capaian Kinerja.

Tabel 22. Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	82,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan II 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Selama Triwulan II tahun 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Permasalahan pada Triwulan I tahun 2024 adalah beragamnya kegiatan teknis dan pemenuhan maupun pelaporan kegiatan sehingga kesulitan untuk memenuhi/melaporkan dokumen SAKIP dengan waktu yang tersedia. Rekomendasi tindak lanjut yang telah dilakukan adalah membagi antara waktu monitoring, evaluasi, pemenuhan dan pelaporan dokumen SAKIP antar anggota tim kinerja. Hasil tindak lanjut rekomendasi oleh pimpinan telah membuat instruksi, arahan secara berkala, serta alokasi waktu untuk menyiapkan dokumen SAKIP kepada tim kinerja. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode yang akan datang adalah tetap melakukan pengelolaan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan capaian kinerja lebih optimal.

IK-12: Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Tabel 23. Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	91,00	-



Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan II 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2023. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Selama Triwulan II tahun 2024 tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Permasalahan pada Triwulan I tahun 2024 adalah beragamnya kegiatan teknis dan pemenuhan maupun pelaporan kegiatan menjadi kewalahan untuk monitoring dan membantu pembudidaya memiliki KUSUKA. Rekomendasi tindak lanjut yang telah dilakukan adalah membagi waktu dan mengoptimalkan personil untuk monitoring dan membantu pembudidaya mendapatkan KUSUKA. Hasil tindak lanjut rekomendasi oleh pimpinan telah membuat instruksi, arahan secara berkala, serta alokasi waktu untuk menyiapkan dokumen KUSUKA. Adapun rencana tindak lanjut untuk Triwulan berikutnya yaitu melanjutkan merekap dan membantu menginput calon penerima bantuan dalam aplikasi KUSUKA juga mendorong penyuluh dan pembudidaya untuk mendaftar ke KUSUKA.

IK-13: Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang Pendidikan; 2) Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan; 3) Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai; dan Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang

pegawai di dalam jabatan diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip the right man and the right place dapat terpenuhi. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu nilai kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari nilai kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/assessment dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN/LHKASN.

Tabel 24. Indeks profesionalitas ASN unit kerja

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
80	76,68	95,85	81	94,67	85,00	90,21

Capaian indikator indeks profesionalitas ASN unit kerja pada Triwulan II 2024 mencapai 76,68 %. Jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2024 maka persentase realisasi indeks profesionalitas ASN sebesar 95,85 %. dan realisasi terhadap target tahunan sebesar 90,21 %. Perbandingan realisasi persentase indeks profesionalisme ASN unit kerja sebesar 94,67 % mengalami penurunan dibanding periode yang sama Triwulan II tahun 2023. Untuk mencapai indeks profesionalisme ASN sesuai target didukung anggaran yang tergabung dalam kegiatan layanan manajemen SDM yaitu sebesar Rp 170.071.000 dan telah ada realisasi anggaran sebesar Rp 23.296.056 sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Kendala dalam pemenuhan capaian indeks profesionalitas ASN adalah ketersediaan diklat fungsional masih menjadi kendala dalam pencapaian indeks yang maksimal, karena kebijakan diklat pejabat fungsional diputuskan oleh pusat.

Kendala ketersediaan diklat fungsional masih terbatas sehingga rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berkaitan agar pejabat fungsional segera mengikuti fungsional. Hasil tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berkaitan agar pejabat fungsional mengikuti diklat fungsional dan melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya pengembangan kompetensi. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya yaitu tetap berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berkaitan agar pejabat fungsional segera mengikuti diklat fungsional serta melakukan sosialisasi terkait bimtek/pelatihan yang mampu menaikkan nilai IP ASN pegawai BPBAP Ujung Batee.

**IK-14: Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee**

Indeks pengelolaan kepegawaian adalah merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup BPBAP Ujung Batee. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel 25. Indeks pengelolaan kepegawaian

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	4,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan II 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Selama Triwulan II tahun 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Pejabat fungsional atau sejenis bidang kepegawaian masih belum ada di unit kerja sehingga rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan Triwulan I tahun 2024 adalah koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berkaitan agar pejabat fungsional/sejenis bidang kepegawaian diakomodir dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK. Hasil tindak lanjut rekomendasi telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berkaitan agar pejabat fungsional/sejenis bidang kepegawaian diakomodir dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK. Rencana aksi untuk periode berikutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi agar indeks pengelolaan kepegawaian lebih optimal.



IK-15: Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh satker yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Predikat WBK merupakan status yang dapat disandang oleh unit kerja yang telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, bebas pungutan liar, dan mampu dipertanggungjawabkan secara berkala. Target unit kerja berpredikat WBK merupakan target yang diberikan kepada beberapa satuan kerja yang telah memiliki status WBK untuk dipertahankan dalam siklus 2 tahunan atau kepada unit kerja yang dipersiapkan untuk menjadi unit kerja bersertifikat WBK. Target ini dapat dinyatakan berhasil saat predikat yang telah diperoleh mampu dipertahankan oleh unit kerja.

Tabel 26. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	76,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan II 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Selama Triwulan II tahun 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Beragamnya kegiatan teknis dan pemenuhan maupun pelaporan kegiatan menjadi kesulitan untuk memenuhi/memperbaharui dokumen-dokumen yang diperlukan. Rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi zona integritas pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan

kualitas pelayanan publik. Hasil tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan zona integritas. Rencana aksi untuk periode berikutnya adalah tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pembangunan zona integritas sesuai ekspektasi serta melakukan update data/dokumen yang diperlukan terkait penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

IK-16: Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee

Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online. Kegiatan pendukung untuk mencapai indikator kinerja ini adalah pengumpulan dan pengolahan isu publik tentang pemberitaan dari media sosial yang mengunggah pemberitaan tentang KKP kemudian mengidentifikasi sifat pemberitaan (positif, negatif atau netral), serta membuat rekapitulasi.

Tabel 27. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
86,00	100,00	116,28	100,00	100	86,00	116,28

Terlihat pada tabel di atas bahwa sampai dengan periode Triwulan II 2024 telah dilakukan perhitungan capaian dengan angka capaian 100% atau 116,28% dari target triwulanan dan tahunan, hal ini menandakan bahwa selama kurun waktu Triwulan II tahun 2024 ini tidak ditemukan adanya pemberitaan yang bersifat negatif terkait BPBAP Ujung Batee. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023 sama yakni 100%. Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator kinerja ini. Selama Triwulan II tahun 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Permasalahan pada Triwulan I tahun 2024 yaitu belum ada tools khusus merekapitulasi berita hanya mengandalkan mesin pencarian Google belum dapat diatasi secara penuh. Pencarian berita masih tetap harus klik satu persatu hasil pencarian kata kunci. Rekomendasi tindak lanjut tetap melakukan kegiatan monitoring hasil pemberitaan baik internal maupun eksternal, serta memanfaatkan Google. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah tetap melakukan kegiatan monitoring hasil pemberitaan baik internal maupun eksternal. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan serta tetap melaksanakan monitoring agar kegiatan sater tidak menimbulkan pemberitaan negatif.



IK-17: Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee

Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan persentase penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BPBAP Ujung Batee sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh BPBAP Ujung Batee. Kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan.

Tabel 28. Persentase Penyelesaian LHP BPK

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	100,00	-

Indikator kegiatan ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan II 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Selama Triwulan II tahun 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana tindak lanjut pada periode berikutnya akan tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-18: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee

Persentase pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun



bab) yang terbit pada Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPBAP Takalar yang menjadi objek pengawasan. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen (%).

Tabel 29. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
80,00	97,22	121,53	100,00	97,22	80,00	121,53

Capaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja sudah melampaui target Triwulan II yaitu sebesar 121,53 %. Perbandingan persentase realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja antara tahun 2024 dan 2023 pada periode yang sama adalah 97,22 %. Selama triwulan kedua 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rekomendasi tindak lanjut kegiatan Triwulan I tahun 2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan dengan berupaya memenuhi rekomendasi hasil pengawasan. Rekomendasi atas rencana aksi periode berikutnya adalah mengidentifikasi penghambat pencapaian target. Rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan guna perbaikan kinerja dan meningkatkan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal KKP terkait penyelesaian rekomendasi.

IK-19: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (1) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (2) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabel 30. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
82	97,68	119,12	85,46	114,3	93,76	104,18

Capaian realisasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada periode Triwulan II 2024 mencapai 119,12 % dan realisasi terhadap target tahunan sebesar 104,18 %. Terdapat kenaikan nilai realisasi IKPA pada Triwulan II 2024 (97,68 %) dibandingkan tahun 2023 (85,46 %) pada periode yang sama. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Rekomendasi tindak lanjut terhadap kegiatan Triwulan I 2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pencapaian indikator lebih maksimal. Pada triwulan II 2024 telah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengisian capaian output maupun revisi rencana penarikan dana. Rekomendasi atas rencana aksi yaitu mengidentifikasi penghambat pencapaian target. Rencana aksi ke depan untuk tercapainya target kinerja ini yaitu dilakukannya kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meningkatkan ketepatan waktu dalam penginputan capaian output kegiatan tiap bulannya.

IK-20: Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Tabel 31. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	80,00	-

Pada periode Triwulan II 2024 belum dilakukan perhitungan penilaian terkait kepatuhan pengelolaan BMN, begitu pula pada periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya (2023), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja. Kegiatan ini akan dilakukan penilaian pada akhir tahun anggaran 2024. Rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana aksi akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, monitoring dan pemantauan secara periodik melalui rekonsiliasi pemanfaatan barang persediaan.

IK-21: Nilai kinerja anggaran BPAP Ujung Batee

Nilai kinerja anggaran merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu program. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2021. Nilai kinerja anggaran lingkup BPAP Ujung Batee diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan RI. Hasil pengukuran aspek impelentasi terdiri dari variabel: Penyerapan Anggaran, Konsistensi atas RPD (awal), Konsistensi atas RPD (akhir), Capaian Keluaran, dan Efisiensi.

Tabel 32. Nilai Kinerja Anggaran

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	86,00	-

Pada periode Triwulan II 2024 belum dilakukan perhitungan penilaian terkait pengelolaan nilai kinerja anggaran (NKA), begitu pula pada periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya (2023), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja. Kegiatan ini akan dilakukan penilaian pada akhir tahun anggaran 2024. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rekomendasi tindak lanjut terhadap triwulan I tahun 2024 adalah

melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pencapaian indikator lebih maksimal. Hasil tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengisian capaian output dari aplikasi SAKTI secara bulanan. Rencana aksi ke depan untuk tercapainya target kinerja ini yaitu dilakukannya kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meningkatkan ketepatan waktu dalam penginputan capaian output kegiatan tiap bulannya.

IK-22: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan.

Definisi pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak rumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor non pemerintah, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

Tabel 33. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	80,00	-

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum ditargetkan. Hal ini dikarenakan indikator ini akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun anggaran 2024 dengan nilai target tahunan sebesar 80 %. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan ini untuk mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Selama Triwulan II tahun 2024 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rekomendasi tindak lanjut triwulan I tahun 2024 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.



Hasil rekomendasi tindak lanjut telah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) secara berkala. Rencana tindak lanjut pada Triwulan berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal dan output yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak dan tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-23: Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Tabel 34. Nilai pengawasan kearsipan

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	75,00	-

Kegiatan pengawasan kearsipan pada periode Triwulan II 2024 belum dilakukan perhitungan penilaian begitu pula pada periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya (2023), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja. Kegiatan ini akan dilakukan penilaian pada akhir tahun anggaran 2024. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Pada Triwulan II tahun 2024, yang menjadi kendala dalam pengelolaan kearsipan pada unit kerja adalah belum ada sumber daya manusia (SDM) kearsipan karena keputusan dan kebijakan ASN berada ditingkat nasional.

Rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang berkaitan agar pejabat fungsional/sejenis bidang kearsipan diakomodir dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK. Hasil tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan usulan pengadaan CPNS/PPPK sebagai arsiparis. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya yaitu tetap melakukan kegiatan kearsipan sesuai kaidah yang ditetapkan serta pengusulan pegawai mengikuti diklat arsiparis dan memonitoring serta berkoordinasi dengan bagian kepegawaian eselon I terkait perkembangan pengadaan SDM tahun 2024.

IK-24: Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee

Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja.

Tabel 35. Persentase layanan perkantoran

Tw II 2024			Realisasi Tw II 2023	Perbandingan Realisasi Tw II 2024 thd Tw II 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
75,00	100,00	133,33	100,00	100,00	75,00	125,00

Indikator persentase layanan perkantoran berhasil mencapai target triwulan II tahun 2024 sebesar 133,33 % dan target tahunan tercapai 125 %. Capaian Triwulan II tahun 2024 sebanding dengan periode yang sama pada tahun 2023. Anggaran layanan perkantoran yang tersedia pada tahun 2024 ini sebesar Rp 10.537.452.000 dan telah terealisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 2.151.403.253. Kegiatan pada Triwulan II tahun 2024 ini melaksanakan kegiatan pelayanan perkantoran tepat waktu dan sesuai dengan yang direncanakan. Personil/SDM masih menyisakan kendala dalam pelayanan perkantoran walaupun telah berkurang dengan penambahan melalui PJLP. Karena keputusan dan kebijakan ASN berada ditingkat nasional.

Rekomendasi tindak lanjut terhadap Triwulan I tahun 2024 adalah mengajukan penambahan SDM melalui seleksi CPNS, PPPK, maupun PJLP. Hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut telah dilakukan upaya-upaya penambahan SDM melalui seleksi CPNS/PPPK melalui usulan walaupun hasil belum karena seleksi CPNS/PPPK. Untuk PJLP telah dilakukan sebanyak 3 orang. Rencana aksi untuk periode berikutnya adalah meningkatkan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan agar mencapai target yang ditentukan serta memonitoring dan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian eselon I terkait perkembangan pengadaan SDM tahun 2024.

3.3. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran BPBAP Ujung Batee dilakukan penghitungan oleh aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

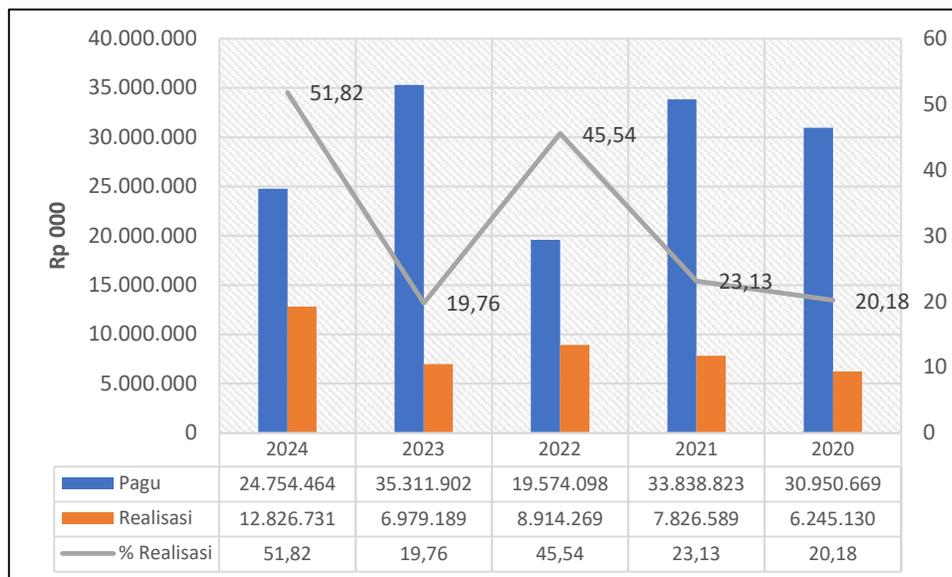
3.4. Kinerja Anggaran

Alokasi APBN tahun 2024 pada BPBAP Ujung Batee awalnya sebesar Rp 25.249.464.000, yang terbagi ke dalam beberapa aktivitas/kegiatan, kemudian revisi menjadi Rp 24.754.464.000. Sedangkan pada tahun 2023 mengelola anggaran akhir setelah beberapa kali refocusing menjadi sebesar Rp 35.311.902.000. Jika dibandingkan, alokasi anggaran tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 36. Pagu anggaran tahun 2020-2024

Aktivitas/Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp 000)	Anggaran 2023 (Rp 000)	Anggaran 2022 (Rp 000)	Anggaran 2021 (Rp 000)	Anggaran 2020 (Rp 000)
Pengelolaan Perbenihan Ikan (2344)	3.859.888	4.506.581	2.712.761	4.744.920	8.605.365
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan (2345)	1.234.433	11.472.463	2.093.262	14.796.227	8.675.632
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan (2346)	7.080.000	7.429.000	3.500.000	2.698.400	1.400.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348)	11.835.773	11.244.282	10.675.751	9.767.689	11.335.272
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747)	744.370	659.576	592.324	1.831.587	934.400
Total Anggaran	24.754.464	35.311.902	19.574.098	33.838.823	30.950.669

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348) pada tahun 2024 menjadi yang tertinggi alokasi anggarannya yaitu mencapai. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747) sebagai terendah sepanjang tahun 2020-2024.



Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2020-2024

Berdasarkan data dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan Triwulan II dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Tahun 2024 tercapai sebesar Rp 12.827.922.418 (51,86 %) dari total pagu sebesar Rp 24.754.464.000.



Realisasi terlihat sudah cukup tinggi mengingat sudah setengah tahun anggaran dan anggaran sudah terealisasi lebih dari 50 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada triwulan yang sama bahwa realisasi anggaran tahun 2024 tertinggi selama periode pengamatan, mencapai 51,86 %, sementara Triwulan II 2023 hanya 19,76 %, Triwulan II 2022 hanya 45,54 %, Triwulan II 2021 hanya 23,13 %, dan Triwulan II 2020 hanya 20,18 %.



BAB 4. PENUTUP

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Triwulan II Tahun 2024 menyajikan capaian indikator kinerja selama Januari s.d Juni 2024. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya pada Triwulan II sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan target triwulanan pada rencana aksi BPBAP Ujung Batee Tahun 2024, dari total 24 indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 11 indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Triwulan II tahun 2024, 3 indikator kinerja tidak mencapai target pada Triwulan II tahun 2024, dan indikator kinerja yang tidak ada data capaiannya sebanyak 10 indikator karena tidak ditarget pada Triwulan II tahun 2024.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 ini antara lain adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum semuanya terlaksana masih ada beberapa paket dalam masa pelaksanaan kontrak.

Dalam rangka peningkatan kinerja BPBAP Ujung Batee, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat maupun instansi lain, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja;
2. Monitoring dan evaluasi pada setiap minggu pertama bulan berjalan (Januari – Desember 2024; Setiap Triwulan Tahun 2024; Setiap Semester Tahun 2024);
3. Rapat pengendalian rutin.

Aquaculture is future



Tugas

Melaksanakan uji terap dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknik perikanan budidaya air payau

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Jalan Laksamana Malahayati Km. 16 Ujung Batee, Masjid Raya, Kab Aceh Besar, Prov Aceh

Telepon : 082273830002 | email : tu.bbapub@gmail.com

<https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>